

## Reinterpretasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Neo-Nasionalisme: Memahami Kemiskinan Struktural sebagai Katalisator Paham Terorisme

Ahmadi Fadillah<sup>1</sup>, Fauzia Gustarina Cempaka Timur<sup>2</sup>, Mochammad Afifuddin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: [ahmadifadillah.dio@gmail.com](mailto:ahmadifadillah.dio@gmail.com)<sup>1</sup>, [fg.cempaka@idu.ac.id](mailto:fg.cempaka@idu.ac.id)<sup>2</sup>, [afifpnb@yahoo.co.id](mailto:afifpnb@yahoo.co.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Dalam konteks sosial-politik Indonesia yang kompleks, kemiskinan struktural dan ancaman terorisme adalah dua permasalahan linear yang memerlukan penanganan serius. Pancasila sebagai dasar negara menawarkan nilai-nilai yang dapat menjadi landasan dalam mengatasi kedua masalah yang saling berhubungan tersebut. Namun, perlu sebuah reinterpretasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks neo-nasionalisme agar relevan dengan tantangan zaman yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana reinterpretasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks neo-nasionalisme dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan struktural demi menangkalkan paham terorisme di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis terhadap literatur, kebijakan publik, dan data-data terkait. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan konsep neo-nasionalisme serta bagaimana keduanya dapat diinterpretasikan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang menjadi katalisator lahirnya terorisme. Penelitian ini didasarkan pada teori-teori tentang konsep Pancasila, neo-nasionalisme, kemiskinan struktural, dan terorisme. Teori-teori ini menjadi kerangka kerja untuk menafsirkan dan menganalisis bagaimana reinterpretasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks neo-nasionalisme dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengadopsi pendekatan neo-nasionalisme, reinterpretasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat dalam mengentaskan kemiskinan struktural sebagai salah satu solusi menangkalkan paham terorisme. Penekanan pada semangat persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi instrumen efektif untuk membangun kekuatan nasional yang tangguh. Reinterpretasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks neo-nasionalisme merupakan langkah yang tepat dalam menghadapi kompleksitas tantangan kemiskinan dan terorisme di Indonesia. Dengan memperkuat identitas nasional yang inklusif dan memberdayakan seluruh elemen masyarakat, Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani masalah internal yang menghambat kemajuan bangsa. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya nyata dalam menghidupkan kembali semangat nasionalisme yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan menerapkan reinterpretasi ini secara konsisten dalam kebijakan dan praktik publik, Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai kedaulatan nasional yang berkelanjutan dan memperkuat kedudukan sebagai negara yang adil dan berdaulat.

**Kata Kunci:** *Reinterpretasi, Pancasila, Neo-nasionalisme, Kemiskinan struktural, Terorisme*

### Abstract

*In Indonesia's complex socio-political context, structural poverty and the threat of terrorism are two problems that require serious handling. Pancasila as the basis of the state offers values that can be the basis for overcoming these two problems. However, there needs to be a reinterpretation of Pancasila values in the context of neo-nationalism so that they are relevant to the challenges of the times that continue to develop. This research aims to explore how reinterpreting Pancasila values in the context of neo-nationalism can be a solution in alleviating structural poverty and countering terrorism in Indonesia. This study uses a qualitative approach by analyzing literature, public policies and related data. This approach provides an in-depth understanding of the values of Pancasila and the concept of neo-nationalism and how both can be interpreted to solve the problems of poverty and terrorism. This research is based on theories about the concepts of Pancasila, neo-nationalism, structural poverty and terrorism. These theories become a framework for interpreting and analyzing how the reinterpretation of Pancasila values in the context of neo-nationalism can provide solutions to the problems faced. The research results show that by adopting a neo-nationalist approach, the reinterpretation of Pancasila values can become a strong foundation in alleviating structural poverty and countering terrorism. The emphasis on the spirit of unity, social justice*

and democracy contained in Pancasila can be an effective instrument for building strong national strength. Reinterpreting Pancasila values in the context of neo-nationalism is the right step in facing the complex challenges of poverty and terrorism in Indonesia. By strengthening an inclusive national identity and empowering all elements of society, Indonesia can be more effective in dealing with internal problems that hinder the nation's progress. The implication of this research is the need for real efforts to revive the spirit of nationalism rooted in the values of Pancasila. By consistently applying this reinterpretation in public policy and practice, Indonesia can build a solid foundation to achieve sustainable national sovereignty and strengthen its position as a just and sovereign country.

**Keywords:** Reinterpretation, Pancasila, Neo-nationalism, Structural poverty, Terrorism



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Dalam konteks sosial-politik Indonesia yang kompleks, fenomena penyalahgunaan konsep Pancasila oleh penguasa sebagai alat untuk menekan gerakan oposisi menjadi sebuah perhatian serius. Pada era Pemilu 2019, terjadi upaya nyata untuk "melebeli" gerakan oposisi atau pengkritik pemerintah dengan label sebagai golongan anti-Pancasila. Hal ini mencerminkan strategi pemerintah dalam menutupi ketidakmampuannya dalam mengentaskan persoalan kemiskinan struktural dan menghadapi tantangan oligarki yang semakin mengakar dalam struktur kekuasaan. Pancasila adalah keyakinan yang dijadikan sebagai dasar berpikir bagi bangsa Indonesia (Bayu Nur Alam, 2024). Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, seharusnya menjadi landasan yang kuat dalam membangun persatuan dan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, terjadi penyalahgunaan konsep Pancasila oleh penguasa untuk kepentingan politik tertentu, terutama dalam menghadapi kritik atau perlawanan terhadap kebijakan yang diambil (Ginting, 2020). Hal ini menjadi perhatian serius karena penggunaan Pancasila sebagai alat untuk membenarkan tindakan represif terhadap pengkritik pemerintah berpotensi merusak esensi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Seperti yang disampaikan oleh Sujiwo Tejo misalnya, dalam forum Indonesia Lawyer's Club: "Pancasila itu ada ga sih? Bagi saya ga ada Pak (Karni). Jujur, yang ada gambar Garuda Pancasila (itu barulah) ada. Teks Pancasila ada, tapi Pancasila itu ga ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang ga ada? Kalau Pancasila itu ada, (maka seharusnya) air kita ga beli. Lapangan Kerja gampang. Perusahaan-perusahaan saldonya Nol, karena tidak mengejar keuntungan... Itu baru Pancasila! Nah ini kan kaya orang sudah menikah, Pak Karni. (ibaratnya seperti sepasang) Suami-Istri menikah, tapi ga pernah ngomong, ga seranjang, terus bilang ke anaknya: 'Kamu jangan anti pernikahan ya, Bapak ini sama Ibu saya menikah.', (gambaran barusan) itu bukan menikah, kertas Nikahnya (memang) ada. Makanya jangan (ada statemen dari pemerintah), 'Radikal adalah yang anti-Pancasila'. *Lho, Pancasila-ne endi? (Pancasila-nya di mana?)*". (ILC: "Apa dan Siapa yang Radikal?" disiarkan pada Selasa, 5 November 2019)

Apa yang diutarakan oleh beliau merupakan ungkapan kegelisahan yang nampaknya sudah menjadi keprihatinan bersama. Hal ini tampak dari respon audiens dalam forum tersebut yang beberap kali memberikan *applause* terhadap pernyataan beliau. Studi ini bertujuan untuk mengungkap fenomena tersebut dalam konteks neo-nasionalisme dan upaya pemerintah dalam menutupi ketidakmampuan mengentaskan persoalan kemiskinan struktural dan oligarki dengan menggunakan Pancasila sebagai alat politik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis teori-teori tentang konsep Pancasila, neo-nasionalisme, kemiskinan struktural, dan terorisme, serta studi tentang karakter bangsa, bela negara, dan sifat peperangan asimetris. Dalam konteks keamanan dan sifat peperangan asimetris, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat untuk menekan gerakan oposisi dapat dilihat sebagai strategi politik yang memanfaatkan keragaman dan kompleksitas masyarakat Indonesia. Lebih

jauh lagi, fenomena ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mempertahankan hegemoni kekuasaan dengan menggunakan narasi nasionalisme yang sempit untuk menghalangi kritik terhadap kebijakan yang diambil (Suryadinata, 2019). Dengan mengungkap fenomena ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik dan keamanan di Indonesia serta memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga independensi nilai-nilai Pancasila dari penyalahgunaan politik. Melalui pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis terhadap upaya-upaya yang bertentangan dengan semangat persatuan dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi landasan negara.

### Kerangka Teoritis

Dalam mengkaji fenomena penyalahgunaan konsep Pancasila oleh penguasa sebagai alat untuk menekan gerakan oposisi dalam konteks neo-nasionalisme dan upaya pemerintah dalam menutupi ketidakmampuan mengentaskan persoalan kemiskinan struktural dan oligarki, kerangka teoritis yang relevan dapat meliputi:

1. **Teori Pancasila:** Melalui pemahaman konsep dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dapat dianalisis bagaimana penggunaan dan penyalahgunaan Pancasila dalam konteks politik memiliki dampak terhadap keberhasilan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan (Hosen, 2015).
2. **Teori Neo-Nasionalisme:** Konsep neo-nasionalisme memberikan wawasan tentang bagaimana identitas nasional dipertahankan atau dimanipulasi oleh pemerintah untuk mencapai tujuan politik tertentu (Adams, 2018). Dalam konteks ini, neo-nasionalisme dapat membantu dalam menganalisis cara-cara di mana penggunaan Pancasila sebagai alat politik tercermin dalam upaya mempertahankan kekuasaan dan hegemoni pemerintah.
3. **Teori Kemiskinan Struktural:** Pendekatan kemiskinan struktural menyoroti aspek-aspek sistemik dan struktural yang memengaruhi kemiskinan, termasuk distribusi kekayaan yang tidak merata dan akses terbatas terhadap sumber daya (Riyanto, 2017). Dalam konteks ini, teori ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab kemiskinan yang tidak diatasi dengan efektif oleh pemerintah, sehingga mendorong penggunaan narasi nasionalisme sebagai penyimpangan dari isu inti.
4. **Teori Terorisme:** Dalam memahami dinamika terorisme, teori ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana ketidakadilan sosial dan politik dapat menjadi pemicu terjadinya radikalisme dan ekstremisme (Schmid, 2013). Dengan demikian, terorisme dapat dianalisis sebagai konsekuensi dari kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan struktural dan ketidakadilan dalam sistem politik.
5. **Teori Memahami Keamanan dan Sifat Peperangan Asimetris:** Kerangka teoritis ini mengkaji sifat perang modern yang cenderung asimetris dan menekankan pentingnya pemahaman tentang keamanan non-konvensional, termasuk ancaman internal seperti terorisme dan radikalisme (Gray, 2019). Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat membantu dalam memahami cara-cara di mana penyalahgunaan Pancasila sebagai alat politik oleh pemerintah berkontribusi terhadap ketegangan politik dan keamanan domestik.

Dengan memadukan kerangka teoritis tersebut, diharapkan dapat memberikan wawasan yang holistik tentang fenomena penyalahgunaan Pancasila dalam konteks kemiskinan struktural, oligarki, dan keamanan nasional. Selain itu, penggunaan teori-teori tersebut juga dapat memperluas pandangan terhadap hubungan antara politik, ideologi, dan keamanan dalam konteks Indonesia yang kompleks.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Pendekatan ini dipilih karena lebih cocok untuk mendalami pemahaman tentang fenomena kompleks seperti penyalahgunaan konsep Pancasila dalam konteks neo-nasionalisme dan dampaknya terhadap penanganan kemiskinan struktural dan oligarki. Berikut adalah langkah-langkah metode penelitian yang digunakan:

1. **Analisis Literatur:** Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap literatur terkait konsep Pancasila, neo-nasionalisme, kemiskinan struktural, terorisme, dan teori keamanan. Analisis literatur dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian.
2. **Analisis Data Kualitatif:** Data kualitatif yang relevan seperti teks wawancara, diskusi/*talkshow*, atau pernyataan publik yang berkaitan dengan penyalahgunaan Pancasila oleh penguasa juga akan dianalisis. Data-data tersebut akan digunakan untuk menggambarkan secara konkret bagaimana konsep-konsep yang dibahas dalam kerangka teoritis diterapkan dalam konteks nyata di Indonesia.
3. **Studi Kasus:** Sebuah studi kasus akan dilakukan untuk mengilustrasikan bagaimana penyalahgunaan konsep Pancasila oleh penguasa sebagai alat politik terjadi dalam praktiknya. Studi kasus akan dipilih dengan cermat untuk mencerminkan dinamika yang kompleks antara kekuasaan politik, ideologi, dan isu-isu sosial seperti kemiskinan struktural dan oligarki.
4. **Analisis Teori-Teori:** Teori-teori yang dijelaskan dalam kerangka teoritis akan digunakan sebagai panduan dalam menganalisis data dan studi kasus. Konsep-konsep yang ada dalam teori-teori tersebut akan diaplikasikan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diamati dalam konteks penelitian.
5. **Interpretasi Hasil:** Setelah semua data terkumpul, analisis akan dilakukan untuk menginterpretasikan hasil penelitian sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dibuat. Interpretasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana penyalahgunaan konsep Pancasila berdampak pada upaya mengatasi kemiskinan struktural dan oligarki, serta implikasinya terhadap keamanan nasional.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dan keamanan di Indonesia, serta memberikan kontribusi dalam menjaga integritas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif dan berkeadilan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan konsep Pancasila oleh penguasa sebagai alat politik dalam menekan gerakan oposisi merupakan fenomena yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam dari berbagai sudut pandang. Dalam konteks Pemilu 2019 di Indonesia, terjadi upaya nyata untuk menyudutkan gerakan oposisi atau pengkritik pemerintah dengan menggunakan narasi anti-Pancasila. Hal ini mencerminkan strategi pemerintah dalam menutupi ketidakmampuannya dalam mengatasi masalah kemiskinan struktural dan menghadapi oligarki yang semakin mengakar dalam struktur kekuasaan. Seperti yang dikemukakan oleh Sudjiwo Tejo dalam forum Indonesia Lawyer's Club, dia mengungkapkan kegelisahan terhadap penyalahgunaan konsep Pancasila dan kehilangan makna substansial dari nilai-nilai Pancasila dalam praktiknya (ILC, 2019). Pernyataan tersebut mencerminkan keprihatinan yang luas di masyarakat terhadap penggunaan politis dari Pancasila sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.



Dalam kerangka teoritis, analisis konsep Pancasila, neo-nasionalisme, kemiskinan struktural, dan terorisme menjadi penting untuk memahami konteks lebih dalam dari fenomena tersebut. Teori-teori ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana penyalahgunaan konsep Pancasila dalam politik berkontribusi terhadap kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Melalui metode analisis literatur, studi kasus, dan interpretasi teori-teori yang relevan, penelitian ini memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dan keamanan di Indonesia. Analisis data kualitatif juga memberikan gambaran konkret tentang bagaimana penyalahgunaan konsep Pancasila terjadi dalam praktiknya, serta dampaknya terhadap upaya mengentaskan kemiskinan struktural dan menghadapi oligarki.

Penggunaan Pancasila sebagai alat untuk membenarkan tindakan represif terhadap pengkritik pemerintah berpotensi merusak esensi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Salah satu fenomena menarik yang sulit untuk dilupakan adalah munculnya Perpu Ormas (PERPU No. 2 Tahun 2017) pada 10 Juli 2017 yang mengatur ulang Dasar Pembentukan Kementerian/ Lembaga/ Badan/ Organisasi. Perpu ini diduga merupakan bentuk keputusan Pemerintah usai beberapa bulan sebelumnya muncul demo berjilid-jilid, dimulai dengan Aksi 411 (4 November 2016), Aksi 212 (2 Desember 2016) dan terus berlanjut beberapa kali hingga pertengahan tahun 2017. Pada awalnya Aksi 411 dan 212 adalah murni gerakan bertajuk “Aksi Bela Islam” sebagai respon keras masyarakat Islam terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Pramuka. Namun nampaknya rentetan aksi setelah itu (11 Februari 2017, 21 Februari 2017, 31 Maret 2017 dan 5 Mei 2017) diramaikan oleh berbagai kalangan masyarakat dan membawa tuntutan yang lebih kompleks seperti tuntutan perbaikan terhadap penegakkan hukum yang tajam kebawah namun tumpul ke atas, sentimen anti oligarki, dan tuntutan-tuntutan perbaikan lainnya terhadap tata kelola pemerintah yang dianggap tak sesuai dengan cita-cita bangsa dan harapan para *Founding Fathers* di awal kemerdekaan. Bahkan termasuk mencuatnya ide penerapan sistem khilafah yang diduga merupakan bentuk justifikasi jalan keluar atas kekecewaan umum terhadap tata kelola negara pada saat itu. Namun rupanya pemerintah terlanjur panik dalam merespon gelombang aksi yang semakin besar dalam di tahun tersebut. Keluarnya Perpu Ormas pada bulan Juli 2016 diduga merupakan respon kepanikan pemerintah Jokowi yang mulai kewalahan dengan gerakan pembangkangan umum (*public disobedience*). Maka perpu tersebut diharapkan dapat memadamkan gelombang gerakan pembangkangan terhadap pemerintah yang dimotori oleh ormas FPI (Front Pembela Islam) kala itu. Bahkan sebulan sebelum keluarnya Perpu Ormas, yakni pada pekan peringatan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2017,

Jokowi mengeluarkan slogan “Saya Indonesia, Saya Pancasila” yang sulit untuk dilupakan. Dampak dari keluarnya slogan tersebut terus dirasakan selama beberapa bulan berikutnya, yakni munculnya persepsi bahwa Pemerintah (dan kelompok pro-Pemerintah) adalah golongan Pancasilais, dan sedangkan bagi mereka yang tidak mendukung pemerintah dengan segala kebijakan yang dikeluarkan akan dianggap sebagai golongan anti-Pancasila. Maka dampak dikeluarkannya slogan tersebut berhasil menciptakan momentum satu bulan kemudian dengan keluarnya Perpu Ormas yang seakan menjadi pilihan wajib untuk menyelamatkan Indonesia dari “kelompok anti-Pancasila” sekaligus membekuk mereka yang melawan pemerintah, termasuk para pengkritik di kelompok oposisi. Kekhawatiran dirasakan oleh para pengamat politik seperti yang disampaikan oleh peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rocky Gerung dalam forum Indonesia Lawyer’s Club: “Kalau dikatakan misalnya ‘(dikeluarkannya Perpu) Ini demi mereka yang akan membubarkan negara’, loh dalam teori membubarkan (negara) itu macam-macam kualifikasinya. Anda mau *alter the government/* melampaui pemerintah karena pemerintah salah, itu juga tindakan membubarkan. Atau anda

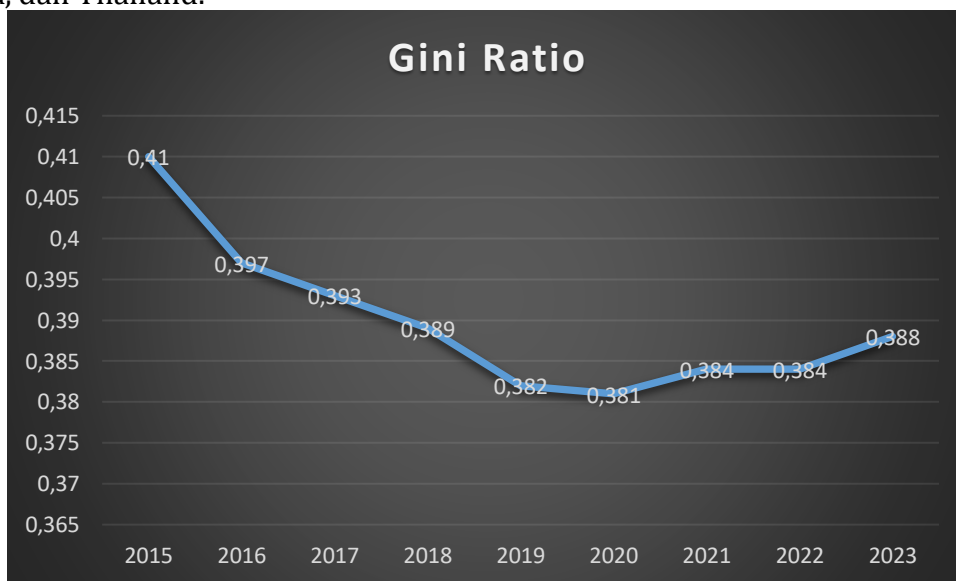
misalnya mau *abolisi*. Itu (tadi) dua istilah yang berbeda tuh. Tapi ga pernah dijelaskan tujuan Perpu ini apa? Mencegah mereka yang hendak meng-*abolisi* pemerintah, atau yang sekedar meng-*alter* pemerintah/ melampaui (karena pemerintah dianggap salah), kalau dikatakan bahwa 'ya (kelompok) ini ga Pancasilais mereka'. Loh kalo tindakan mereka justru berbeda hanya karena Pancasila sekedar menghasilkan Perpu, Utang, dan Pansus, (maka) jelas Pancasila musti dikritik!". (ILC: "Panas setelah Perpu Ormas" disiarkan pada Selasa, 18 Juli 2017)

Apa yang diutarakan oleh beliau merupakan ungkapan kegusaran yang nampaknya sudah menjadi keprihatinan bersama. Hal ini tampak dari respon audiens dalam forum tersebut yang beberap kali memberikan *applause* terhadap pernyataan beliau. Interpretasi hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan konsep Pancasila oleh penguasa sebagai alat politik memiliki implikasi yang serius terhadap keberhasilan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Upaya untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi mendasar dengan menggunakan narasi nasionalisme sempit menimbulkan ketegangan politik dan sosial yang dapat mengancam stabilitas nasional. Cara pemerintahan era Jokowi dalam mengatasi masalah sosial ekonomi mendasar dengan menggunakan narasi nasionalisme sempit dapat ditunjukkan dengan gesture pemerintah setiap kali hendak menyelesaikan persoalan konflik horizontal. Seperti yang disampaikan oleh peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rocky Gerung dalam forum Indonesia Lawyer's Club: "Problem kita sebetulnya, setiap kali ada konflik horizontal (maka) yang diundang pertama ke istana (negara) adalah pemuka agama. Padahal problem-nya problem sosial. Akibatnya kita selalu melihat soal (kekerasan yang terjadi seperti hari) ini (adalah) soal teologis. Ga dibongkar *social condition* dari kekerasan itu. (Padahal) kondisi sosial dari (yang terjadi di balik) kekerasan itu, itu-lah yang musti (dibongkar dan) diterangkan dari dalam istana, supaya orang ngerti tuh. Tahun 40an ada konflik sejenis semacam beginian di India. Ada seorang India beragama muslim, sudah 5 hari di rumahnya, ga bisa keluar karena ada mayoritas hindu yang sedang mempersekusi minoritas muslim di India. Akhirnya (di hari kelima) dia ga tahan, dia keluar rumah untuk membeli susu (untuk) bayinya. Istrinya (mungkin) bilang 'Keluar rumah aja, kalo engga bayinya meninggal ga ada susu...' tuh. Ini (kisah) keluarga miskin. Akhirnya dia maksa keluar rumah. Dan dia diuber, dan dibunuh, di halaman rumah seorang hindu pada waktu itu. Terbunuhlah dia. Pertanyaan saya, Apakah dia tewas karena dia muslim, atau karena dia miskin? Kalau dia kaya, dia bisa pake helikopter untuk pergi beli susu... karena dia punya uang tuh. Tapi karena dia ga punya uang, dia meninggal di situ. Jadi (mari) kita berpikir ulang, apa *social origins* dari kekerasan. Kita ada di dalam situasi yang sama hari-hari ini... Yang terbunuh itu, terbunuh di halaman rumah Amartya Sen, ekonom pemenang nobel (penghargaan), yang kemudian menulis begitu bagus tentang problem kemiskinan. Sehingga (hari ini) kita ekonom (dan) *social scientists* tau apa yang disebut Sen Index, yang memperlihatkan bahwa tingkat kebahagiaan itu tidak diukur dengan model-model makro. Tapi tentang soal apa yang sekarang kita sebut sebagai *human development index*/ kesejahteraan komunitas/ kesejahteraan manusia. Ukuran itu ga ada di kita hari ini. Dan (hal) itu menimbulkan ketidakmampuan kita untuk menganalisis. Karena (pemerintah) kita tidak mampu menganalisis secara kuantitatif, maka kita pergi (mengalihkan) pada soal-soal kualitatif, 'wah ini adalah soal pertandingan teologi'. Itu perkara-nya (yang jadi problem pemerintah kita hari ini)". (ILC: "Teror ke Pemuka Agama, Adakah Dalangnya?" disiarkan pada Selasa, 13 Februari 2018)

Apa yang diutarakan oleh beliau merupakan sebuah penjelasan akademis yang bisa menjelaskan bahwa cara pemerintah dalam menyelesaikan persoalan konflik horizontal dengan meminta bantuan pemuka agama untuk menyampaikan narasi nasionalisme adalah wujud bukti ketidakmampuan pemerintah dalam menganalisis bahwa *social origins* dari

kekerasan adalah problem kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dan fakta ini tentu menjadi keprihatinan bersama. Hal ini tampak dari respon audiens dalam forum tersebut yang sangat serius dalam menyimak pernyataan beliau. Dalam menghadapi tantangan ini, memang benar bahwa penting bagi masyarakat Indonesia untuk tetap kritis terhadap upaya-upaya politik yang bertentangan dengan semangat persatuan dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi landasan negara. Penguatan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas nilai-nilai Pancasila dan memperjuangkan keadilan sosial merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan (Riyanto, 2017). Namun sudah semestinya akar permasalahan yang menjadi sumber dari konflik horizontal itu-lah yang musti dientaskan, yakni soal mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sayangnya persoalan kemiskinan struktural-lah yang menjadi hambatan bagi Indonesia untuk mendistribusikan kesejahteraan.

Menurut data Badan Pusat Statistik pada September 2015, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,40. Itu artinya, 1% penduduk terkaya Indonesia menguasai 40% kekayaan nasional. Meski demikian angka ini menurun sebesar 0,01 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2015 yang sebesar 0,41 (BPS, 2016). Angka tersebut berhasil diturunkan pada tahun berikutnya yakni Maret 2016, tingkat ketimpangannya adalah sebesar 0,397 (BPS, 2016). Namun pada tahun yang sama, survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, menemukan bahawa 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Kondisi ini hanya lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand.



**Tabel Pertumbuhan Gini Ratio penduduk Indonesia 2015-2023**

Sumber: data Badan Pusat Statistik (BPS)

Masih menurut data Badan Pusat Statistik pada Maret 2018, tingkat Gini Ratio penduduk Indonesia adalah sebesar 0,389. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393 turun sebesar 0,004 poin (BPS, 2018). Pada Maret 2019, Gini Ratio turun kembali menjadi 0,382 (BPS, 2019). Lalu kembali turun pada Maret 2020, yakni menjadi 0,381 (BPS, 2020). Tiga tahun kemudian pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia naik kembali menjadi 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384 (BPS, 2023). Ada faktor resesi akibat pandemi yang mungkin menjadi penyebab menurunnya

ketimpangan, bahwa pandemi menyebabkan menurunnya produktifitas industri di Indonesia dan seluruh dunia. Namun temuan menariknya adalah justru UMKM-lah yang mampu bertahan dan berkembang menjamur dalam situasi pandemi. Bahkan dengan jumlahnya yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha nasional, lalu kontribusi UMKM yang menyumbang 60,5% dari keseluruhan PDB, dan penyerapan tenaga kerja yang mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional, maka UMKM menjadi salah satu penyangga pertumbuhan ekonomi nasional selama masa pandemi (Kemenko Perekonomian RI, 2022). Sekali lagi, **kekuatan rakyat-lah pada akhirnya yang menjadi penyelamat perekonomian nasional**, bukan konglomerat.

Data yang ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik di atas merupakan gambaran bahwa pembangunan perekonomian Indonesia masih jauh dari harapan dan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang diharapkan pada masa awal kemerdekaan oleh para *Founding Fathers*, yakni pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang konsisten di atas 0,38 (sedang) menjadi petunjuk langsung bahwa distribusi kesejahteraan di Indonesia masih belum benar-benar merata. Ketimpangan pengeluaran dan kesenjangan pendapatan dapat disebabkan oleh hasil pembangunan yang belum merata yang terjadi akibat kesalahan dalam prioritas pembangunan nasional yang melahirkan kemiskinan struktural (Yulianto, 2019). Kemiskinan struktural sendiri diartikan sebagai kondisi kemiskinan yang lahir akibat dari struktur sosial yang kacau yang mengakibatkan masyarakat termarginalisasi dan sulit memperoleh akses terhadap berbagai peluang (Purwandari, 2013). Hal ini senada dengan apa yang dituturkan oleh Selo Soemardjan (1980), kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat akibat struktur sosial yang mengakibatkan masyarakat tersebut tidak bisa ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Sebagai gambaran, peneliti mewawancarai seorang petani di Ponjong, Gunungkidul. Dalam wawancara petani mengatakan bahwa pada era saat ini menjadi petani sangatlah berat, hampir selalu rugi. Kerugian yang dimaksud tak hanya ditimbulkan oleh faktor alam yang menyebabkan gagal panen, melainkan juga kebijakan impor oleh pemerintah setiap kali musim panen tiba: "Bayangkan saja Mas. Petani kesulitan mendapatkan pupuk murah, ketika panen harga justru jatuh (karena stok melimpah akibat impor) dan tengkulak bahkan membeli hasil panen kami dengan harga rendah. Belum lagi jika kami gagal panen. Menjadi petani itu selalu dirugikan. Maka tak heran jika anak-anak muda sekarang tidak tertarik menjadi petani. Termasuk anak saya sendiri saya dorong untuk belajar ke kota dan jangan menjadi petani. Orang sekarang daripada punya lahan 1 hektar untuk menanam padi, lebih untung membangun kos-kosan atau kontrakan untuk disewakan. Itulah (situasi) yang terjadi di wilayah *sampeyan* (kabupaten sleman) saat ini".

Apa yang dirasakan oleh beliau merupakan gambaran keresahan bersama yang dirasakan oleh para petani Indonesia. Permainan mafia impor dan kemandulan sistem hukum di Indonesia telah gagal melindungi rasa kepercayaan masyarakat untuk terus menjadi pejuang agrikultur Indonesia. Bahkan pada awal tahun 2021 lalu, Bappenas memperkirakan pada tahun 2063 tak ada lagi profesi petani. Hal ini seiring dengan turunnya pekerja di sektor pertanian (Kompas, 2021). Ketiadaan rancangan kebijakan untuk *proteksi* (melindungi) petani lokal adalah satu contoh langsung bahwa kecenderungan arah dan prioritas pembangunan oleh pemerintahan Indonesia di era pasca reformasi masih kurang memperhatikan jati diri bangsa Indonesia sebagai Negara Agraris. Tentu saja hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Masih berhubungan dengan persoalan tanah, jika dalam wawancara bersama petani Gunungkidul disebutkan bahwa petani di daerah Sleman banyak mengalihkan fungsi lahan pertaniannya untuk membangun kos/kontrakan, faktanya adalah kebanyakan dari para petani



di Sleman justru menjual lahannya, entah karena faktor ketiadaan biaya sekolah/kuliah untuk anaknya, atau karena sebab pembagian waris, ataupun faktor lainnya. "Sialnya adalah, kebanyakan dari tanah tersebut jatuh ke tangan penduduk luar Jogja. Hal ini sangat mungkin disebabkan karena masyarakat (pembeli) dari luar Jogja memiliki kemampuan lebih untuk menawar dengan harga tinggi, dibandingkan dengan masyarakat Jogja sendiri. Hal ini berkaitan dengan rendahnya pendapatan rata-rata masyarakat Jogja sebab UMR kami yang tergolong rendah se-Nasional", demikian dituturkan oleh seorang peneliti fenomena *Gentrifikasi* di Yogyakarta yang tidak ingin disebutkan namanya. Dampak dari fenomena *Gentrifikasi* adalah masyarakat asli/lokal yang terusir secara perlahan karena tidak mampu mengakses atau membeli rumah hunian ataupun tanah dengan harga yang terjangkau dan murah. Jika hal semacam ini terus dibiarkan, maka akan memunculkan kesenjangan sosial dan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat yang dapat berimplikasi terhadap munculnya kriminalisme dan konflik horizontal. Maka lagi-lagi ini soal Kemiskinan Struktural yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Permasalahan Petani Indonesia dan Fenomena *Gentrifikasi* di Yogyakarta merupakan dua contoh langsung dari sekian problem yang dihadapi Indonesia pada era pasca reformasi. Masih banyak persoalan-persoalan lain yang tak kalah kronis yang dihadapi oleh bangsa ini seperti masalah korupsi, kasus jual-beli pasal UU, eksplorasi yang menyebabkan kerusakan alam -pun menggusur tanah adat, dan persoalan-persoalan lainnya, di mana jika kita perhatikan sedikit lebih cermat maka hampir kesemuanya memiliki benang merah keterhubungan dengan problem oligarki. Sayangnya, ketika masyarakat menunjukkan kemarahan lewat momentum yang disalurkan bersama melalui aksi-aksi seperti yang terjadi di tahun 2016-2017 misalnya, pemerintah justru alergi dan cepat-cepat menganggap bahwa aksi tersebut hanya sebatas kemarahan kolektif terhadap silap lidah seorang Gubernur DKI Jakarta. Padahal jika benar persoalannya hanya sebatas itu, maka tidak mungkin euforia semangat perubahannya bisa dirasakan selama berbulan-bulan! Jelas terasa sekali ada hasrat tuntutan perubahan oleh masyarakat pada waktu itu, meyerupai reformasi 98.

Kendati cara pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan narasi nasionalisme dianggap tidak tepat, bisa jadi apa yang telah terjadi pada masa-masa tersebut memang dinilai tepat dalam perspektif lain. Dalam kajian Pertahanan, ada konsep yang disebut *proxy war* yakni sebuah konfrontasi antara dua kekuatan (negara) besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal (Badiklat Kemhan, 2020). Pemain pengganti di sini bisa bermakna aktor boneka yang mana biasanya bersifat non-negara (*non-state actors*), tujuan eksistensinya adalah untuk mengganggu stabilitas keamanan dan daulatan negara di mana ia bertempat. Kedua negara yang diwakilkan oleh aktor-aktor boneka (*proxy*) tersebut melemahkan kekuatan satu-sama lain melalui sektor politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Ada kalanya salah satu negara merasa tidak mampu menghadapi dan mengendalikan situasi yang mulai berat sebelah (merugikannya) dengan cara-cara *soft-approach* (non-militer) yang selama ini dilakukan. Maka untuk menjawab persoalan ini, digunakanlah upaya '*sekuritisasi*' (pengamanan) terhadap isu yang dihadapi, dan lahirlah konsep "*Sekuritisasi*".

"*Sekuritisasi*" adalah sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh ahli teori hubungan internasional asal Denmark, Ole Wæver, pada tahun 1995. Dalam studi '*sekuritisasi*', konsep ini mengacu pada cara pemerintah mengubah isu-isu yang sebelumnya bukan masalah keamanan (militer) menjadi isu keamanan. Dalam konteks peperangan asimetris, '*sekuritisasi*' dapat mengacu pada bagaimana cara pemerintah atau entitas yang lebih kuat menggambarkan kelompok boneka (aktor non-negara) sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Dengan

cara tersebut dapat memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mengambil tindakan militer atau keamanan yang lebih agresif dalam menangani konflik asimetris, seperti insurgensi (pemberontakan), terorisme, dan ancaman Cyber Warfare (peperangan siber). Maka barangkali keluarnya Perpu Ormas (PERPU No. 2 Tahun 2017) merupakan serangkaian upaya sekuritisasi oleh Pemerintah terhadap ancaman keamanan nasional berupa gelombang demonstrasi yang dimotori oleh ormas FPI (Front Pembela Islam) kala itu. Jika benar demikian, maka langkah pemerintah adalah tepat, menurut kacamata kajian Pertahanan. Meski demikian, penyelesaian gejolak dengan pendekatan seperti itu merupakan sebuah langkah strategis cepat dalam merespon isu keamanan nasional, dan tidak menyelesaikan akar masalah yakni kemiskinan struktural sebagai *social origins* di balik gejolak masyarakat. Jika akar masalah tersebut terus dibiarkan, maka isu kesenjangan sosial dan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat masih akan terjadi dan menjadi bom waktu yang akan memunculkan kembali kriminalisme, konflik horizontal maupun gejolak masyarakat di masa mendatang. Maka sangat memungkinkan jika kedepannya bibit-bibit ekstrimisme dan terorisme kembali bangkit di Indonesia, sebab ketidakadilan sosial dan politik dapat menjadi pemicu terjadinya radikalisme dan ekstremisme (Schmid, 2013). Dan tentu saja, hal ini adalah bentuk ancaman nyata *proxy war* di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik dan keamanan di Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun negara yang inklusif dan berdaulat (Adams, 2018).

### Analisis

Penyalahgunaan konsep Pancasila oleh penguasa sebagai alat politik dalam menekan gerakan oposisi telah menjadi fenomena yang kompleks. Hal tersebut tercermin dengan kekhawatiran luas di masyarakat terhadap penggunaan politis dari Pancasila sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Sudjiwo Tejo dalam forum Indonesia Lawyer's Club mengekspresikan kegelisahan terhadap penyalahgunaan konsep Pancasila dan kehilangan makna substansial dari nilai-nilai Pancasila dalam praktiknya. Analisis dengan menggunakan kerangka teoritis yang melibatkan konsep Pancasila, neo-nasionalisme, kemiskinan struktural, dan terorisme menjadi penting untuk memahami fenomena ini lebih dalam. Teori-teori tersebut memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana penyalahgunaan konsep Pancasila dalam politik berkontribusi terhadap kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Melalui metode analisis literatur, studi kasus, dan interpretasi teori-teori yang relevan, penelitian ini mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dan keamanan di Indonesia. Terutama, penyalahgunaan konsep Pancasila sebagai alat untuk membenarkan tindakan represif terhadap pengkritik pemerintah berpotensi merusak esensi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Selanjutnya, upaya pemerintahan era Jokowi dalam mengatasi masalah sosial ekonomi mendasar dengan menggunakan narasi nasionalisme sempit juga dianalisis. Hal ini disampaikan oleh Rocky Gerung dalam forum Indonesia Lawyer's Club. Menurutnya, pemerintah seringkali mengundang pemuka agama untuk menyelesaikan persoalan konflik horizontal, padahal masalah tersebut berakar pada kondisi sosial dan ekonomi yang tidak merata. Analisis ini menyoroti kekurangan pemerintah dalam memahami akar permasalahan yang menjadi sumber dari konflik horizontal, yaitu kemiskinan struktural dan ketidakadilan sosial. Selain itu, penelitian juga membahas masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia masih tinggi, yang menandakan distribusi kesejahteraan yang belum merata. Faktor-faktor seperti fenomena gentrifikasi di Yogyakarta juga diangkat, menunjukkan bahwa ada

kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam distribusi lahan dan kekayaan. Dari perspektif kajian Pertahanan, penyalahgunaan konsep Pancasila oleh pemerintah dapat dipahami sebagai bagian dari upaya sekuritisasi terhadap ancaman keamanan nasional. Penggunaan narasi nasionalisme dan penerbitan Perpu Ormas bisa diinterpretasikan sebagai strategi untuk merespons gejolak masyarakat yang dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Namun, pendekatan tersebut **tidak menyelesaikan akar permasalahan**, yaitu kemiskinan struktural dan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, analisis ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik, sosial, dan ekonomi dalam konteks keamanan nasional. Langkah-langkah kebijakan yang diambil harus mengatasi akar permasalahan kemiskinan struktural dan ketidakadilan sosial, bukan hanya merespons secara sekuritisasi terhadap gejolak sosial. Hal ini sesuai dengan konsep memahami keamanan dan sifat peperangan asimetris sebagai landasan analisis.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap fenomena penyalahgunaan konsep Pancasila sebagai alat politik, serta dampaknya terhadap tantangan keamanan nasional dan sifat peperangan asimetris di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Penyalahgunaan Konsep Pancasila:** Konsep Pancasila sering digunakan oleh penguasa sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan gerakan oposisi. Hal ini tercermin dalam penggunaan politis Pancasila dalam konteks Pemilu 2019 dan tindakan represif terhadap pengkritik pemerintah.
2. **Dampak Terhadap Keamanan Nasional:** Penyalahgunaan konsep Pancasila dapat memperkuat legitimasi tindakan represif pemerintah dalam menghadapi ancaman internal, namun tidak menyelesaikan akar masalah dan justru memperburuk ketegangan sosial.
3. **Tantangan Kemiskinan Struktural:** Kemiskinan struktural menjadi akar permasalahan yang menyebabkan ketimpangan sosial dan konflik horizontal di Indonesia. Tinjauan terhadap data statistik menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum merata dan masyarakat.
4. **Implikasi Terhadap Pembangunan Nasional:** Penanganan yang holistik terhadap kemiskinan struktural, pengurangan ketimpangan sosial, dan penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, upaya untuk memperkuat integritas nilai-nilai Pancasila, mengatasi kemiskinan struktural, dan mengurangi ketimpangan sosial menjadi penting dalam membangun masyarakat yang stabil dan berkeadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut perlu didukung oleh upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J. (2018). *Neo-Nationalism and its Effects on Indonesian Politics*. Journal of Southeast Asian Studies.
- Adams, V. (2018). *After Evil: A Politics of Human Rights*. Columbia University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Gini Ratio pada September 2015 Sebesar 0,40*.  
(Diakses pada hari Sabtu, 20 April 2024 pukul 19.33 WIB dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2016/04/18/1277/gini-ratio-pada-september-2015-sebesar-0-40.html>)
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Gini Ratio Pada Maret 2016 Sebesar 0,397*.

- (Diakses pada hari Sabtu, 20 April 2024 pukul 19.35 WIB dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2016/08/19/1280/gini-ratio-pada-maret-2016-sebesar-0-397.html>)
- Badan Pusat Statistik. (2018). "*Gini Ratio Maret 2018 tercatat sebesar 0,389*".
- (Diakses pada hari Sabtu, 20 April 2024 pukul 19.39 WIB dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2018/07/16/1533/gini-ratio-maret-2018-tercatat-sebesar-0-389.html>)
- Badan Pusat Statistik. (2019). "*Gini Ratio Maret 2019 tercatat sebesar 0,382*".
- (Diakses pada hari Sabtu, 20 April 2024 pukul 19.40 WIB dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2019/07/15/1630/gini-ratio-maret-2019-tercatat-sebesar-0-382.html>)
- Badan Pusat Statistik. (2020). "*Gini Ratio Maret 2020 tercatat sebesar 0,381*".
- (Diakses pada hari Sabtu, 20 April 2024 pukul 19.41 WIB dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/07/15/1748/gini-ratio-maret-2020-tercatat-sebesar-0-381.html>)
- Badan Pusat Statistik. (2023). "*Gini Ratio Maret 2023 tercatat sebesar 0,388*".
- (Diakses pada hari Sabtu, 20 April 2024 pukul 19.41 WIB dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2035/gini-ratio-maret-2023-tercatat-sebesar-0-388-.html>)
- Badiklat KEMHAN, (2020). "*Bahan Pembelajaran Proxy War*".
- Bayu Nur Alam, F. G. (2024). The Role of the Nation's Generation in Maintaining the Pancasila Ideology Amid the Onslaught of the Entry of Foreign Cultures into Indonesia. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS) Volume 3 Number 5, April, 2480-2487*.
- Credit Suisse. (2016). "*2016 Global Wealth Data Book*".
- (Diakses pada hari Sabtu, 20 April 2024 pukul 19.35 WIB dari <http://publications.credit-suisse.com/index.cfm/publikationen-shop/research-institute/global-wealth-databook-2016-en/>)
- Gerung, Rocky. (2017). "*Panas setelah Perpu Ormas*". Indonesia Lawyers Club (Disiarkan pada Selasa, 18 Juli 2017)
- Gerung, Rocky. (2018). "*Teror ke Pemuka Agama, Adakah Dalangnya?*". Indonesia Lawyers Club (Disiarkan pada Selasa, 13 Februari 2018)
- Ginting, D. P. (2020). "*Pancasila sebagai Alat Politik: Analisis Kritis terhadap Penyalahgunaan Konsep Pancasila dalam Konteks Politik Indonesia*". Jurnal Politik.
- Ginting, E. (2020). "*Manipulasi Pancasila oleh Penguasa: Studi Kasus Era Pemilu 2019*". Jurnal Politik dan Kebijakan.
- Gray, C. (2019). "*Understanding Modern Warfare*". Routledge.
- Hosen, N. (2015). "*Pancasila sebagai Dasar Negara: Antara Konstitusi dan Politik Identitas*". Jurnal Konstitusi.
- Kemenko Perekonomian RI. (2022). "*Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*".
- (Diakses pada hari Sabtu, 20 April 2024 pukul 19.45 WIB dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/%20perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>)
- Kompas.com. (2021). "*Bappenas: Tak Ada Lagi Profesi Petani pada 2063*".
- (Diakses pada hari Minggu, 21 April 2024 pukul 09.45 WIB dari [https://money.kompas.com/read/2021/03/23/190000426/bappenas-tak-ada-lagi-profesi-petani-pada-2063#google\\_vignette](https://money.kompas.com/read/2021/03/23/190000426/bappenas-tak-ada-lagi-profesi-petani-pada-2063#google_vignette))



- Ole Wæver. (1995). *"Securitization and Desecuritization"* (dalam "On Security", edited by Ronnie D. Lipschutz). New York: Columbia University Press
- Purwandari, E. (2013). *"Ekonomi Politik Kemiskinan: Kritik atas Paradigma Kesejahteraan"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purwandari, Heru. (2013). *"Respon Petani Atas Kemiskinan Struktural"*. Jurnal Universitas Jember
- Riyanto, S. (2017). *"Pengaruh Faktor Kemiskinan Struktural terhadap Ketidakstabilan Politik di Indonesia"*. Jurnal Analisis Politik.
- Schmid, A. P. (2013). *"The Routledge Handbook of Terrorism Research"*. Routledge.
- Suryadinata, L. (2019). *"Politik Neo-Nasionalisme dalam Era Kontemporer: Implikasi terhadap Dinamika Sosial-Politik di Indonesia"*. Jurnal Kajian Politik.
- Tejo, Sujiwo. (2019). *"Apa dan Siapa yang Radikal?"*. Indonesia Lawyers Club  
(Disiarkan pada Selasa, 5 November 2019)
- Yulianto, E. (2019). *"Membedah Dampak Kemiskinan Struktural terhadap Kesejahteraan Masyarakat"*. Jakarta: Gramedia.
- Yulianto, Trimo. (2019). *"Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia sebagai Sumber Penerimaan Negara"*. DJPb Kementerian Keuangan RI